

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **2026**



**Dinas Pemberdayaan  
Perempuan & Perlindungan  
Anak Provinsi Kaltim**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

## Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

## Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
  - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 September 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MASUD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMU

NIP. 19690512 198903 2 009

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang akan telah ditetapkan untuk tiga tahun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024-2026. Berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan beberapa perubahan dalam tujuan dan sasaran ke depannya.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan serta pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereviuu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui RENJA diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

#### BAB I : Pendahuluan

- 1.2 Latar Belakang..... 7
- 1.2 Landasan Hukum..... 9
- 1.3 Maksud dan Tujuan..... 12
- 1.4 Sistematika Penulisan ..... 12

#### BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan  
Capaian Renstra Perangkat daerah ..... 14
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 99
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  
Daerah ..... 99
- 1.4 Review Terhadap Rancangan RKPD..... 106
- 1.5 Penelaahan Usulan Masyarakat..... 124
- 1.6 Program dan kegiatan .....

#### BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 140
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 141
- 3.3 Program dan Kegiatan ..... 142

#### BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..... 166

#### PENUTUP

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang akan telah ditetapkan untuk tiga tahun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024-2026. Berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan beberapa perubahan dalam tujuan dan sasaran ke depannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan. Pada level pemerintah daerah disusun Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Perencanaan Tahunan (RKPD) dan untuk level perangkat daerah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) serta Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancangan RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja (Renja) Dinas DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pada DP3A Provinsi Kaltim yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD. Dengan

adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 5 Rancangan Kerja Tahun 2025-2026 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menuntut pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian terjadi perubahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) berubah menjadi Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) dengan mandat 2 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya Renja Dinas DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kaltim Tahun 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja DP3A Tahun 2026 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim
20. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

## **Maksud dan Tujuan**

### **2. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja DP3A Provinsi Kalimantan Timur (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

### **3. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dan evaluasi program kegiatan dalam penyusunan rencana anggaran DP3A Provinsi Kalimantan Timur.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 terdiri dari :

### **BAB I : Pendahuluan**

- 1.2 Latar Belakang
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Maksud dan Tujuan
- 1.7 Sistematika Penulisan

### **BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
- 3.4 Fungsi Perangkat Daerah
- 3.5 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 3.6 Penelaahan Usulan Masyarakat
- 3.7 Program dan kegiatan

- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.6 Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF). Untuk Dana APBD sebesar Rp, **40.077.474.996,00-** di dalamnya termasuk DAK-NF sebesar Rp **505.690.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **36.894.635.174,00,-** atau 92,06%. Secara rinci tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Realisasi anggaran dan fisik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.2.14.2.12.01.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				40.077.474.996,00	36.894.635.174,00	92,06
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks	82,00	90,00	23.657.029.172,00	22.120.618.109,00	93,81
		%	100,00	100,00			
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	%	70,50	75,50	595.025.900,00	571.826.706,00	96,10
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	137.400.000,00	131.858.000,00	95,97
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	111.063.900,00	101.727.138,00	91,59
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen	1,00	2,00	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1,00	2,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	3,00	134.582.000,00	126.580.701,00	94,05
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	171.200.000,00	170.880.867,00	99,81
<b>2.08.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>94,00</b>	<b>92,06</b>	<b>12.648.110.396,00</b>	<b>12.244.979.465,00</b>	<b>96,81</b>
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00	38,00	12.548.110.396,00	12.145.081.431,00	96,79
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	45.000.000,00	44.960.034,00	99,91
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16,00	16,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	20.000.000,00	19.938.000,00	99,69
<b>2.08.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>orang</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>997.723.056,00</b>	<b>885.027.229,00</b>	<b>88,70</b>
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3,00	3,00	181.206.000,00	174.840.000,00	96,49
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	75,00	75,00	611.554.000,00	534.361.999,00	87,38
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	10,00	204.963.056,00	175.825.230,00	85,78
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>3.392.660.016,00</b>	<b>3.264.714.220,00</b>	<b>96,23</b>
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1,00	1,00	15.000.000,00	14.995.000,00	99,97
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6,00	6,00	223.000.000,00	222.935.524,00	99,97

2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2,00	2,00	148.179.016,00	148.178.000,00	100,00
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	96,00	96,00	15.609.000,00	11.760.000,00	75,34
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	300.000.000,00	257.688.000,00	85,90
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	3,00	2.470.430.000,00	2.400.872.956,00	97,18
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	220.442.000,00	208.284.740,00	94,49
<b>2.08.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1.205.007.164,00</b>	<b>1.071.155.000,00</b>	<b>88,89</b>
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1,00	1,00	342.000.000,00	287.700.000,00	84,12
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30,00	30,00	863.007.164,00	783.455.000,00	90,78
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jenisjasa</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3.890.445.940,00</b>	<b>3.591.911.039,00</b>	<b>92,33</b>
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	21.086.000,00	20.530.000,00	97,36
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1,00	1,00	608.884.000,00	371.717.039,00	61,05
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1,00	1,00	91.410.000,00	91.398.600,00	99,99
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1,00	1,00	3.169.065.940,00	3.108.265.400,00	98,08
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>928.056.700,00</b>	<b>491.004.450,00</b>	<b>52,91</b>
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1,00	1,00	26.767.500,00	22.557.900,00	84,27
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	24,00	33,00	262.560.000,00	262.262.550,00	99,89
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1,00	1,00	638.729.200,00	206.184.000,00	32,28

2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	orang	400,00	400,00	4.250.481.300,00	3.788.160.637,00	89,12
2.08.02.1.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah</i>	lembaga	10,00	10,00	1.244.373.000,00	1.151.047.848,00	92,50
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Laporan	1,00	3,00	462.600.000,00	431.158.717,00	93,20
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	178.257.000,00	157.581.062,00	88,40
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Orang	130,00	130,00	603.516.000,00	562.308.069,00	93,17
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	lembaga	1,00	1,00	791.514.000,00	736.263.364,00	93,02
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Orang	430,00	430,00	433.257.000,00	404.364.663,00	93,33
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Lembaga	10,00	10,00	358.257.000,00	331.898.701,00	92,64
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	orang	400,00	400,00	2.214.594.300,00	1.900.849.425,00	85,83
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembaga	1,00	1,00	170.400.000,00	150.246.436,00	88,17
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang	300,00	300,00	1.787.737.300,00	1.535.797.372,00	85,91
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Unit	1,00	0,00	256.457.000,00	214.805.617,00	83,76
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	%	90,00	100,00	1.981.341.360,00	1.641.277.746,00	82,84

2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak	Lembaga	10,00	9,00	1.378.937.600,00	1.075.596.241,00	78,00
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3,00	3,00	772.137.600,00	501.922.319,00	65,00
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	10,00	10,00	606.800.000,00	573.673.922,00	94,54
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	75,00	103,00	602.403.760,00	565.681.505,00	93,90
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30,00	98,00	112.360.000,00	103.723.085,00	92,31
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	40,00	50,00	490.043.760,00	461.958.420,00	94,27
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	%	75,00	100,00	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	data	20,00	102,00	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	462.565.000,00	398.640.980,00	86,18
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	494.800.000,00	447.322.868,00	90,40
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	%	90,00	90,00	1.960.840.000,00	1.758.944.445,00	89,70
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia	lembaga	10,00	10,00	1.130.890.000,00	952.060.789,00	84,19

2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	490.200.000,00	358.114.318,00	73,05
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	30,00	30,00	640.690.000,00	593.946.471,00	92,70
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	lembaga	10,00	10,00	829.950.000,00	806.883.656,00	97,22
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1,00	1,00	659.750.000,00	647.288.861,00	98,11
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1,00	1,00	170.200.000,00	159.594.795,00	93,77
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	4,07	11,28	1.726.536.164,00	1.511.663.804,00	87,55
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	lembaga	1,00	1,00	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	laporan	75,00	75,00	299.066.000,00	278.550.800,00	93,14
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Orang	30,00	67,00	36.701.076,00	30.526.000,00	83,17
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	30,00	134,00	262.364.924,00	248.024.800,00	94,53
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Dokumen	1,00	1,00	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02

2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Dokumen	1,00	1,00	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	%	70,00	88,23	1.859.900.000,00	1.814.809.483,00	97,58
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	1.560.500.000,00	1.532.414.499,00	98,20
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	1.512.200.000,00	1.490.659.499,00	98,58
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	48.300.000,00	41.755.000,00	86,45
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran	Dokumen	1,00	1,00	299.400.000,00	282.394.984,00	94,32
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	167.400.000,00	153.539.583,00	91,72
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	132.000.000,00	128.855.401,00	97,62
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	%	100,00	99,00	426.278.000,00	399.812.727,00	93,79
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	226.700.000,00	206.983.770,00	91,30
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	182.600.000,00	170.580.770,00	93,42
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	36.403.000,00	82,55
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dokumen	2,00	2,00	199.578.000,00	192.828.957,00	96,62

2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	91.460.000,00	86.119.057,00	94,16
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	108.118.000,00	106.709.900,00	98,70
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	kali	2,00	2,00	524.446.000,00	476.673.662,00	90,89
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%	27,00	100,00	344.100.000,00	304.877.267,00	88,60
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	150.000.000,00	140.450.662,00	93,63
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	23.103.000,00	52,39
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1,00	3,00	150.000.000,00	141.323.605,00	94,22
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	180.346.000,00	171.796.395,00	95,26
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	48.346.000,00	47.782.275,00	98,83
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50,00	60,00	132.000.000,00	124.014.120,00	93,95
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	%	2,10	2,18	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	sektor	5,00	5,00	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42

2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1,00	1,00	185.890.000,00	185.627.200,00	99,86
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	1,00	1,00	187.300.000,00	159.278.860,00	85,04
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	67,98	66,30	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	0,76	0,76	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	1,00	78.000.000,00	76.682.180,00	98,31
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Daerah	1,00	1,00	137.400.000,00	131.753.750,00	95,89
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	1,00	1,00	939.000.000,00	883.439.902,00	94,08
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	%	63,46	64,54	1.205.668.000,00	1.099.928.821,00	91,23
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	organisasi	4,00	4,00	987.010.000,00	893.279.559,00	90,50
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1,00	1,00	793.810.000,00	707.479.382,00	89,12
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	1,00	1,00	193.200.000,00	185.800.177,00	96,17

2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	%	30,00	30,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	1,00	1,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51

### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terpenuhinya Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan dikarenakan tidak dapat memenuhi pengisian persyaratan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Upaya sosialisasi telah dilakukan) serta belum adanya keseragaman layanan dan program dalam pemberdayaan perempuan, yang menyebabkan kesenjangan kualitas dan kinerja LPLPP dalam menjawab kebutuhan masyarakat

### 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan DP3A Provinsi Kalimantan timur secara keseluruhan di tahun 2024 terlaksana atau terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 92,06 %, hal ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang memadai.

### 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program dan kegiatan pada DKP3A provinsi Kalimantan timur di tahun

2024 terlaksana sesuai dengan target kegiatan. DP3A telah berupaya untuk terus menjalankan aktifitas program/kegiatan khususnya terkait pelayanan masyarakat dan program prioritas.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana

lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai.
2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur sebagai pedoman Pelaksanaan dalam Terwujudnya Pembangunan yang setara dan berkeadilan.
3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui melalui satgas perlindungan perempuan dan anak.
4. Dua Urusan dalam Institusi DP3A Provinsi Kalimantan Timur memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data, baik data administrasi kependudukan, data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, data Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB, dll)

#### 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan Renstra Perangkat daerah
- Kurang Maksimalnya operasional rutinitas DP3A Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan

sesuai dengan peraturan yang ada.

- Masih Belum tersedianya Data pilah Gender secara baik pada setiap Perangkat Daerah
- Perangkat daerah belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan.
- Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif.
- Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
- Sifat Tugas kewenangan DP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas Tenaga Kerja, Disperindakop, Perbankan, dll).
- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam pengendalian administrasi kependudukan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergalidan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- Melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan

- Meningkatkan komitmen antar unit kerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumberdaya melalui program dan kegiatan
- Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur  
s/d Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target progra m dan kegiata n Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan	91,2 indeks	90%	82 indeks	90 indeks	109,76	91 indeks	84 indeks	100 %
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	87%	-	100 %	100 %	100	85 %	100 %	100 %
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50 %	100 %	70,50 %	75,50%	107	71 %	71 %	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	19 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	-	-	-	-	23 laporan	23 laporan	100 %

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>95,00 %</b>	<b>92 %</b>	<b>94,00 %</b>	<b>92,06 %</b>	<b>98</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>	<b>100 %</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 orang/bulan	44 orang	50 orang/bulan	38 orang/bulan	76	71 orang/bulan	71 orang/bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan	16 Laporan	4 laporan	16 dokumen	16 dokumen	100	18 laporan	18 laporan	100%

		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulnan/triwulan/semestrian SKPD								
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	-	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>95%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>86 Orang</b>	<b>100%</b>	<b>80 orang</b>	<b>80 orang</b>	<b>100</b>	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	-	-	-
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	-	75 Orang	10 Orang	10 Orang	100	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100 %
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumah orang yang mengikuti sosialisas	-	-	75 orang	75 orang	-	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	78 orang	78 orang	100 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>117 unit</b>	<b>100%</b>	<b>111 unit</b>	<b>111 unit</b>	<b>100</b>	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	-	4 paket	1 paket	1 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100 %
					<b>27</b>					

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	6 paket	6 paket	6 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	2 paket	2 paket	2 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	-	84 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	96 dokumen	96 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	-	1 laporan	3 laporan	3 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100 %
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah</b>	-	20%	32 unit	32 unit	100	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	-	25 unit	30 unit	30 unit	100	-	-	-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yan disediakan	-	-	-	--	-	30 unit	30 unit	100 %
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan</b>	4 jenis jasa	100%	4 jenis jasa	4 jenis jasa	100	-	-	-
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>pemerintah daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>88 unit</b>	<b>100%</b>	<b>86 unit</b>	<b>86 unit</b>	<b>100</b>	-	-	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	-	15 paket	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	-	-	-	-	24 unit	24 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	-	-	-	-	60 unit	60 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	-	1 tahun	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %

	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasahaan	-	-	400 orang	400 orang	100	-	-	-
		Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen	45,92 %	-	-	-	-	45,11 %	35%	100 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,20 – 51,26 %					49,65 – 50,83 %	49,65 – 50,83 %	
		Implementasi kelembagaan PUG	-	1 kebijakan	-		-	-	-	-
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 Lembaga	-	10 Lembaga		100	-	-	-
		Penguatan lembaga PUG	-	1 kebijakan	-		-	-	-	-

		<b>Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan</b>	10 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	-	31 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	-	-	130 orang	130 orang	100	30 orang	30 orang	100 %
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provins	1 kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum</b>	-	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP</b>	<b>1 lembaga</b>	-	-	-	-	-	-	-

	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	-	-	-	-	-	-	-
	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya	100 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	-	430 orang	430 orang	100	200 orang	200 orang	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasahaan</b>	<b>300 orang</b>	-	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>100</b>	-	-	-

		<b>Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</b>	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	10 lembaga	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100 %
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	-	-	300 orang	300 orang	100	100 orang	100 orang	100 %

		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	100 orang	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	-	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100 %-
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	-	-	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	-	-	-
		<b>Kebijakan Perlindungan Perempuan</b>	-	<b>2 Kebijakan</b>	-	-	-			-

		<b>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>Rasio 47.00</b>	.....	<b>47,67</b>	-	-	<b>47,67 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	-	-	10 lembaga	9 lembaga		-	-	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	1 dokumen	-	-		-	-	-
		Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	-	-	-		-	-	-
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegaha	1 dokumen	-	-	-		-	-	-
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provins	300 orang	-	-	-		-	-	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	-	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	100 %
		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	-	10 layanan	-	-	-	-	-	-

	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	-	-	75 %	103 %	137	-	-	-
		<b>jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan</b>	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	-	99 orang	30 orang	98 orang	326	40 orang	40 orang	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	40 orang	50 orang	125	50 layanan	50 layanan	100 %

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan</b>	-	15 orang	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	15 orang	-	-	-	60 orang	60 orang	-
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>	-	-	90 %	90 %	100	-	-	-
		<b>Penguatan Pemenuhan Hak Anak</b>	-	-	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100	-	-	-
		<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	61,5 indeks	-	60,47 %	-	-	61,5 indeks	61 indeks	100 %
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA</b>	10 lembaga	-	10 lembaga	10 lembaga	100	-	-	-

		<b>Penguatan pelebagaan PHA</b>	-	-	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	-	-	-
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	300 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-

	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	35 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>10 lembaga</b>	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>100</b>	-	-	-

		<b>Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak</b>	-	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	-	-	-

		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	88 %	-	-	-	-	82	82	100 %-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
		<b>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</b>	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provins	300 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provins	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	100 lembaga							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi	-	-	-	-	-	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan</b>	-	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	67 orang	223	40 orang	40 orang	100 %

	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	134 orang	446	50 layanan	50 layanan	100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</b>	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100</b>	-	-	-
		<b>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</b>	<b>1 lembaga</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah</b>	-	-	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100</b>	-	-	-

		<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	20 data	-	20 data	120 data-	510	-	-	-
		<b>Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah</b>	-	75%	-	-	-	-	-	-
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan	20 lembaga							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia	-	3 dokumen	-	-	-	-	-	-

		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia		1 dokumen		-	-	-	-	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	-	1 dokumen	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar</b>	<b>12 Lemabaga</b>							
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga	2 lembaga							
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 lemabaga							

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Kebijakan tentang pengendalian penduduk		1 Kebijakan	-	-	--	-	-	-
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,78 %	-	-	-	-	2,16 %	2,16 %	100 %
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,12 %					18,37 %	18,37 %	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	-	5 sektor	5 sektor	100	-	-	-
		kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100 %

	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	-	-	-	-
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/S SK dan Pojok Kependudukan/P JK	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100 %
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>	<b>69 %</b>	<b>68,42</b>	<b>67,98</b>	<b>66,30</b>	<b>97.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		Persentase Kebutuhan Ber KB yang Terpenuhi (nmet Need)	79,09 %	-	-	-	68,42 % 21 %	68,42 % 21 %	68,42 % 21 %	100 %
		Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	69 %							
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95 %	0,76%	0,76	0,76%	100	-	-	-
		Peningkatan jumlah peserta KB	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	1 daerah	-	-	-	1 daerah	1 daerah	100 %

	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	1 daerah	-	-	-	1 daerah	1 daerah	100 %
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>persentase kampung KB mandiri</b>	<b>5,10 %</b>							
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	4 organisasi							
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</b>	<b>79,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

		<b>ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>								
		<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>4 organisasi</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	3 organisasi	1 organisasi	-	-	-	2 organisasi	2 organisasi	100 %

	<b>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>persentase organisasi Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga</b>	<b>50 %</b>	<b>40 %</b>	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah laporan hasil Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan</b>	<b>90,79%</b>	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>95%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis laporan</b>							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>88 unit</b>							

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit							
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi</b>	<b>100 %</b>							-
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA</b>	<b>43 orang</b>	-	-	-	-	-	-	-
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	10 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-

	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensi</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	8 orang							
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-				
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	-						
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-				

	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang .	-	-	-	-	-	-	-
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya. Analisis kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dan tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2026. Analisis kinerja pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra PD (%)		Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan		90%	84 indeks	91,2 indeks	95%	90%	82 indeks	84 indeks	
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti		100%	100%	87%	100%	100%	100%	100 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,00%	71 %	76,50 %	70,50%	76,00%	70,50 %	71,50 %	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	2 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah		1 dokumen	23 Laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	3 Laporan	3 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 dokumen	1 Laporan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 laporan	
	Pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah berita acara forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		-	2 berita acara	2 berita acaar	-	-	-	2 berita acaar	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>100 %</b>	<b>2 bulan</b>	<b>94,00 %</b>	<b>95,00 %</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2 bulan</b>	<b>94,00 %</b>	<b>95,00 %</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	1 tahun	71 orang/bulan	60 orang/bulan	1 tahun	1 tahun	50 orang/bulan	45 orang/bulan	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		-	2 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun		1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	12 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah lapoan keuagamm bulanan/triwulan/semesteram SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulnan/triwulan/semestrear SKPD		3 dokumen	16 Laporan	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	16 Laporan	18 dokumen	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelapon dan analisis prognosis realiasi anggaran	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-	-	2 dokumen	2 dokumen	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>80%</b>	<b>82 Orang</b>	<b>86 orang</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80 Orang</b>	<b>86 orang</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai		4 Paket	3 Paket	3 paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	3 paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		44 Orang	10 orang	12 orang	44 Orang	44 Orang	85 orang	12 orang	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumah orang yang mengikuti sosialisas		-	78 orang	85 orang	-	-	85 orang	85 orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>113 unit</b>	<b>117 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>111 unit</b>	<b>117 unit</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 paket	5 komponen	1 paket	1 paket	5 komponen	5 komponen	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 paket	6 item	6 paket	10 paket	6 item	6 item	6 paket	10 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		26 item	2 paket	2 paket	26 item	26 item	2 paket	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	84 dokumen	300 eksemplar	96 dokumen	96 dokumen	300 eksemplar	300 eksemplar	96 dokumen	96 dokumen	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi		75 orang	1 laporan	1 laporan	75 orang	75 orang	1 laporan	1 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD		1 dokumen	3 laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>90%</b>	<b>33 unit</b>	<b>34 unit</b>	<b>82%</b>	<b>90%</b>	<b>32 unit</b>	<b>34 unit</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		5 unit	30 unit	30 unit	5 unit	5 unit	30 unit	30 unit	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan		-	1 unit	9 unit	-	-	1 unit	9 unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>62%</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>4 jenis jasa</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia		600 eksemplar	1 laporan	1 laporan	800 eksemplar	600 eksemplar	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 laporan	1 tahun	1 tahun	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	4 unit	1 laporan	1 laporan	4 unit	4 unit	1 laporan	1 laporan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>12 unit</b>	<b>87 unit</b>	<b>88 unit</b>	<b>11 unit</b>	<b>12 unit</b>	<b>86 unit</b>	<b>88 unit</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia		15 unit	24 unit	26 unit	15 unit	15 unit	1 unit	26 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara		-	60 unit	60 unit	-	-	24 unit	60 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	6 ruang	1 unit	1 unit	6 ruang	6 ruang	1 unit	1 unit	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan</b>		<b>1 Kebijakan</b>	<b>300 orang</b>	<b>-</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>400 orang</b>	<b>300 orang</b>	
	<b>Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen</b>		-	-	<b>45,92 %</b>	-	-	-	-	
	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>		-	-	<b>50,20 - 51,2</b>	-	-	-	-	
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan lembaga PUG kewenangan provinsi</b>		<b>400 orang</b>	<b>10 Lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>400 orang</b>	<b>400 orang</b>	<b>10 Lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara PUG tingkat provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggara PUG	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi		130 Orang	30 orang	35 orang	130 Orang	130 Orang	-	35 orang	

	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provins				1 kebijakan					
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				37 lembaga					
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah				1 lembaga					
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	<b>Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum</b>		-	-	-	-	-	-		
		<b>Jumlah Organisasi Masyarakat Menuju LPLPP</b>		1 Lembaga	1 Lembaga	1 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 lembaga	
		<b>Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum</b>		-	-	-	-	-	-		
	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan				5 lembaga					
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				260 orang					

	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				100 orang					
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		430 Peserta	300 orango	450 orang	190 Peserta	430 Peserta	450 orang	450 orang	
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		-	2 lembaga	-	-	-	2 lembaga	-	-
		Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di kab/kota	-	2 lembaga	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	2 lembaga	-

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan</b>		<b>400 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	<b>300 orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>400 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	<b>300 orang</b>	<b>-</b>
		<b>Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins				1 Laporan					
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimte				200 Orng					
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi		1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi		500 peserta	100 orang	300 orang	500 peserta	500 peserta	300 orang	300 orang	-
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	

		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>				<b>47 Ratio</b>					
		<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>		<b>23,46 %</b>	<b>24,96 %</b>		<b>23,46 %</b>	<b>23,46 %</b>	<b>23,24 %</b>	<b>24,96 %</b>	<b>-</b>
		<b>Kebijakan Perlindungan Perempuan</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan				<b>10 lembaga</b>					
		<b>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</b>	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>		<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>-</b>
		<b>jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 Dokumen					

	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				300 Orang					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	
		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</b>	-	75%	50 layanan	50 %	75%	75%	80%	50 %	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan		-	-	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		30 orang	300 Orang	50 orang	30 orang	30 orang	40 Orang	50 orang	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Melaksanakan penguatan dan pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi</b>		-	60 orang	-	-	-	-	-	-
		<b>peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan</b>	15 orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		-	60 orang	-	-	-	-	-	-
		<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA</b>				61,5 indeks					
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/kota layak anak</b>		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-
		<b>Penguatan Pemenuhan Hak Anak</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA</b>		10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	-
		<b>Penguatan pelembagaan PHA</b>	1 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi				1 kebijakan					
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapat bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				30 orang					
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 klaporan					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		-	3 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-	-	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-
	Advokasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		30 perangkat daerah	3 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-	30 perangkat daerah	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 organisasi perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	-	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>10 lembaga</b>	-
		<b>Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Ana	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				2 kebijakan					
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins				1 dokumen					
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>				<b>64 indeks</b>					
		<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>		<b>4,07 %</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,88 %</b>	<b>4,07 %</b>	<b>4,07 %</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,88 %</b>	-
		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</b>				<b>1 lembaga</b>					
		<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>		<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	-
		<b>dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins		Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				300 orang					

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provins	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				100 lembaga						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak		1 dokumen	1 dokumen	1 lembaga						
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>		<b>75 layanan</b>	<b>50 layanan</b>	<b>80 layanan</b>	<b>75 layanan</b>	<b>75 layanan</b>	<b>80 layanan</b>	<b>80 layanan</b>	-	
		<b>jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi		30 orang	30 orang	50 orang	30 orang	30 orang	40 orang	50 orang	-
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi		30 orang	50 layanan	-	30 orang	30 orang	50 orang	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>					<b>100 %</b>					
	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>		<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>
	<b>Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>		<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	<b>20 data</b>	
		<b>Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				1 Dokumen					
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan ana	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				20 Lembaga					
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	--	2 dokumen	4 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		2 dokumen	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar</b>				<b>12 lembaga</b>					
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga				2 Lembaga					
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Lembaga					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR</b>				<b>17,78 %s</b>					
			<b>2,10%</b>	<b>60 %</b>	<b>60%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,10%</b>	<b>55 %</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>	

		<b>Kebijakan tentang pengendalian penduduk</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</b>		<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	<b>5 sektor</b>	-
		<b>kebijakan tentang pengendalian penduduk</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK		1 laporan	3 laporan	3 laporan						
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK		1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (meet need) Angka prevalensi</b>				<b>79,09 %</b>						-
		<b>Angka prevalensi kontrasepsi modern</b>		<b>67,98%</b>	<b>68,42 %</b>	<b>69 %</b>	<b>67,98%</b>	<b>67,98%</b>	<b>68,42 %</b>	<b>68,42 %</b>		
		<b>Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Ratio akseptor KB</b>	-	0,76 %	0,76 %	0,95 %	0,76 %	0,76 %	0,76 %	0,76 %	0,76 %	-
		<b>Peningkatan jumlah peserta KB</b>	<b>1 dokumen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja		1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-

	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	persentase kampung KB mandiri				5,10 %					
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				4 organisasi					
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</b>				79,50 %					
		<b>Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)</b>		63,64 indeks	65,54 indeks	65,54 indeks	63,64 indeks	63,64 indeks	65,54 indeks	65,54 indeks	-
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan perempuan</b>		4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	-
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Fasilitasi pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB		1 organisasi	12 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	-

	<b>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>persentase organisasi Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga</b>	-	30%	40%	50%	30%	30%	40%	50%	-
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				<b>1 Laporan</b>					
	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				<b>1 Laporan</b>					
	<b>UPTD PPA</b>										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>				<b>100 % 90,79 indeks</b>					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Realisasi Anggaran</b>				<b>95 %</b>					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	umlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				<b>1 dokumen</b>					
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>4 jenis jasa</b>					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				<b>4 laporan</b>					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>				<b>88 unit</b>					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				<b>1 unit</b>					
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>				<b>100 %</b>					
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah</b>	<b>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA</b>				<b>43 orang</b>					
	<b>Kabupaten/Kota</b>										

	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>2 orang</b>					
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>8 orang</b>					
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>30 orang</b>					
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>3 orang</b>					
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>10 orang</b>					
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>30 orang</b>					
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>30 orang</b>					
	layanan kesehatan yang	Jumlah Korban yang mendapatkan				<b>3 orang</b>					

	tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>				<b>100 orang</b>					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus				<b>43 orang</b>					
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>30 orang</b>					
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>2 orang</b>					
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>30 orang</b>					
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>8 orang</b>					
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>2 orang</b>					

	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS,	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan				<b>3 orang</b>					
	Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>2 orang</b>					
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				<b>10 orang</b>					

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi
1	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan :</b> $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	Rasio			<b>Rasio Kekerasan Terhadap Anak :</b> $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi}}{\text{Jumlah penduduk anak}} \times 10.000$
2	Meningkatnya Pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP3A	
3	Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Persentase UMKM Perempuan	%	Peran perempuan dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan selaku penggerak UMKM.	BPS	$\frac{\text{Jumlah penggerak umkm wanita prov.kaltim}}{\text{jumlah penggerak umkm prov.kaltim}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	ukuran untuk menilai pembangunan keluarga, yang berfokus pada tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga juga merupakan bagian dari program Bangga Kencana, yang merupakan program	BKKBN	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi
				pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Indonesia,		
5	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	DP3A	<p>Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

## Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PPPA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut Target dan realisasi Sasaran Strategis pada DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	23,46	47,67
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lemba PEKKA	2	1
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400	400
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,53	1,93
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat	%	75	100
5	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%		71,90

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

##### a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak serta belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, permasalahan ini yang lebih dikenal dengan

sebutan 3 M yaitu (1) akhiri kesenjangan Ekonomi, Politik dan pengambilan keputusan perempuan, (2) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan (3) akhiri perdagangan orang.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahannya adalah masih rendahnya minat akseptor KB metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif gender, tingginya angka perkawinan usia anak dan masih banyaknya usia remaja (sekolah) yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK R dan BKR.

2.3.2 Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/intenasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Pemahaman dan komitmen para pengambil

kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan urusan dalam tahapan pembangunan

- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan angka kemiskinan perempuan yang cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
- Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota
- Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar
- Beberapa kebijakan strategis dari Kementerian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja DP3A Provinsi Kalimantan timur
- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk

meningkatkan kesetaraan gender di daerah

- Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030)
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak
- Mekuatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak
- Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.

- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
  - Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
  - Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
  - Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
  - Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
- Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
  - Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
  - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
  - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
  - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
  - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
  - Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
- c. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat

dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tdk mengetahui lembaga layanan.
- ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
- ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
- ✓ Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis.

- Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
- Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.

d. Permasalahan Perlindungan Anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
- Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
- Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.

- Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
- e. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
- Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
  - Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
  - Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
  - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
  - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
  - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
  - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
  - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
- f. Permasalahan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
  - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
  - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
  - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
  - Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
- g. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh

kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.

- Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
- Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
- Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
- Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD secara umum berhasil diselesaikan , tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realisasasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 95%. Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran

- Meningkatkan kualitas hidup perempuan sasaran
- Meningkatkan implementasi PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi
- Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga
- Meningkatkan implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

2.4.1 Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, DKP3A melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

2.4.3 Temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2025 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA

Rancangan Awal Renstra				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikaif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
<b>DP3A PROV. KALTIM</b>			<b>17.721.892.000</b>	<b>DP3A PROV. KALTIM</b>			<b>23.847.191.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>22.520.769.305</b>
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 indeks	11.909.944.729	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 indeks	17.777.376.393
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	430.000.000	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	430.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	60.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	60.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.500.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.500.000
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.500.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.500.000

[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	136.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	136.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	219.000.000	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	219.000.000
<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>95%</b>	<b>8.764.656.956</b>	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>95%</b>	<b>14.568.985.411</b>
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	8.764.656.956	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	14.342.145.411
(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	117.120.000,00	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	128.840.000
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	30.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	30.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>.....</b>	<b>16.250.518,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>.....</b>	<b>16.250.527,00</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	16.250.518,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	16.250.527,00

[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	48.000.000,00	[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	48.000.000,00
Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	48.000.000,00	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	48.000.000,00
[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825,00	[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.026.600,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.026.600,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	2.612.085.937	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	40.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	40.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	409.777.225
[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	35.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	35.000.000,00
[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.613.012.817,00	[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.676.116.017,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	334.316.800,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	397.420.000,00

[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.258.696.017,0 0	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.258.696.017,00
<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>88 unit</b>	<b>458.220.613,00</b>	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>88 unit</b>	<b>458.220.613,00</b>
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	55.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	55.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	191.220.613,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	191.220.613,00
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	67.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	67.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	145.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	145.000.000,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>	<b>35 % 51,20 - 51,26 %</b>	<b>1.072.180.012</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>	<b>35 % 51,20 - 51,26 %</b>	<b>1.072.180.012</b>

[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 lembaga	286.478.704,00	[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 lembaga	286.478.704,00
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	43.367.918,00	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	43.367.918,00
[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646,00	[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646,00
[ SUB KEGIATAN ] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	1 lembaga	49.268.140,00	[ SUB KEGIATAN ] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	1 lembaga	49.268.140,00
[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	405.709.606,00	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	405.709.606,00
[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	160.661.480,00	[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	160.661.480,00
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	93.265.510,00	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	93.265.510,00
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	151.782.616,00	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	151.782.616,00

[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	397.937.862,00	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	379.991.702,00
[ SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	43.761.200,00	[ SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	43.761.200,00
[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	101.478.850,00	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	101.478.850,00
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	234.751.652,00	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	234.751.652,00
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47	818.400.000,00	[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47	818.400.000,00
[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	818.400.000,00	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	818.400.000,00
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		300.000.000,00
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		518.400.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	149.326.798,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	149.326.789,00

<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	<b>149.326.798,00</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	<b>149.326.798,00</b>
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	149.326.798,00	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	79.326.789,00
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>61,5 indeks</b>	<b>830.515.814,00</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>61,5 indeks</b>	<b>757.869.026,00</b>
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>480.419.499,00</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>407.772.711,00</b>
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	60.945.320,00	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	60.945.320,00
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	30 orang	149.255.429,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	30 orang	149.255.429,00
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provins	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	72.646.788,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provins	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	197.571.962,00
<b>[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	197.571.962,00	<b>[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	197.571.962

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	350.096.315,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	144.037.102,00
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	144.037.102,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	197.571.962
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	206.059.213,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	144.037.102,00
<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>84%</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>84%</b>	<b>350.096.315,00</b>
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		400.000.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		144.037.102,00
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	400.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	206.059.213,00
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	600.000.000,00	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	600.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000.000,00

[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 dokumen	600.000,00	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 dokumen	200.000.000,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	600.000,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	400.000.000,00
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b>	<b>2,14%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b>	<b>2,14%</b>	<b>872.970.297,00</b>
					<b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</b>		
[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	300.000.000,00	[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	872.970.297,00
[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	100.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	872.970.297,00
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	100.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	872.970.297,00
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>	<b>20%</b>	<b>872.970.297,00</b>	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)</b>	<b>20%</b>	<b>395.776.032.00</b>

					Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (Mcpr)		
[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95%	378.427.353,00	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95%	295.776.032,00
[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	125.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	95.776.032,00
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	125.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	100.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	125.750.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	100.000.000,00
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Persentase kampung KB mandiri		100.000.000,00
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50%	127.677.353,00	[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50%	378..427.353,00

[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	125.000.000,00	[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	125.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	125.000.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	125.000.000,00
[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	3 organisasi	253.427.353,00	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	3 organisasi	253.427.353,00
[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50%	125.750.000,00	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	50%	125.750.000,00

Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	3 laporan	127.677.353,00	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 laporan	127.677.353,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------

				UTPTD			1.326.421.695,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90,79 indeks	394.419.345,00
				[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran	95 %	52.560.000,00
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumrn	52.560.000,00
				Penyediaan JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis Jasa	257.867.345,00
				)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	257.867.345,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik	88 Unit	83.992.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	83.992.000
				[ PROGRAM ] PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	466.436.420,00
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA	43 Orang	466.436.420,00
				[ SUB KEGIATAN ] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	16.025.000,00

				Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	40.800.000,00
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	164.650.000,00
				[ SUB KEGIATAN ] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	17.500.000,00
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	50.617.567,00
				[ SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	108.570.000,00
				[ SUB KEGIATAN ] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	2 Orang	47.122.028,00

				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	21.151.825,00
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	100 &	<b>465.565.930,00</b>
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 Orang	<b>465.565.930,00</b>
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	155.050.000,00
				] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	15.000.000,00
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	108.570.000,00

				] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	60.600.000,00
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 Orang	11.182.000,00
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	16.320.975,00
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	47.448.132,00
				layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	51.394.823,00

### 2.5.1 Proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

DP3A Provinsi Kalimantan Timur membangun Partisipasi masyarakat dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penerbitan rekomendasi hasil telaahan program dan kegiatan masyarakat, meliputi :

1. Badan kerja sama organisasi wanita (BKOW) Provi. Kaltim
2. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur
3. Dharma Wanita Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

### 2.5.1 Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3A Provinsi Kalimantan Timur .Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Rakortekrenbang 2024 mencerminkan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, serta dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai tujuan bersama. Pada pelaksanaan Rakortekbang yang telah berlangsung di Tahun 2025 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim

untuk Kabupaten Kota yang telah membuat Kamus Usulan khususnya pada Kota Samarinda dan Kabupaten Berau yaitu peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi perempuan Kepala Keluarga (Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran aktif, peningkatan SDM dan ekonomi kreatif bagi perempuan), hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki perempuan menjadi isu penting di masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan hidup yang datang dari ketidakseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan rendahnya tingkat keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki, Hal ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur**

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,2 indeks	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	95%	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	
(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	.....	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	
<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>86 orang</b>	
Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	
<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>117 unit</b>	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	
<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis jasa</b>	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	
<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>88 unit</b>	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	
[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Prov. Kaltim			
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>	<b>35 % 51,20 - 51,26 %</b>	
<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	
[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ SUB KEGIATAN ] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	
[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	
[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	
<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>300 orang</b>	
[ SUB KEGIATAN ] monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	
[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Prov. Kaltim	<b>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>Rasio 47</b>	
<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>10 lembaga</b>	
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	300 orang	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>	<b>100%</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>20 data</b>	
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1ndeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>61,5 indeks</b>	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>10 lembaga</b>	
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	30 orang	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	
[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	Prov. Kaltim	<b>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>84%</b>	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>61,5 indeks</b>	
[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	
[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	300 orang	
[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b>	<b>17,78</b>	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
	Prov. Kaltim	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,12	
[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	
[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	
[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prov. Kaltim	PProporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	79%	
	Prov. Kaltim	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (Mcpr	69%	
[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	Ratio akseptor KB	0,95%	
[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Prov. Kaltim	Persentase kampung KB mandiri		
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</b>	<b>79,50%</b>	
<b>[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	<b>4 organisasi</b>	
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	
<b>[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Prov. Kaltim	<b>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</b>	<b>3 organisasi</b>	
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	<b>50%</b>	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 laporan	
<b>UTPTD</b>	<b>Prov. Kaltim</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	
	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>90,79 indeks</b>	
<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	95%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prov. Kaltim	Jumlah Jenis JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis jasa	
)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik	88 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	
<b>[ PROGRAM ] PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prov. Kaltim	<b>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA</b>	43 orrang	
[ SUB KEGIATAN ] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
[ SUB KEGIATAN ] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	
[ SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
[ SUB KEGIATAN ] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	2 orang	
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 orang	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	10 orang	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2026 juga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, telah diusulkan pada prioritas nasional 3 yaitu :

**“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”** dan untuk mendukung program prioritas tersebut maka diusulkan program DP3A Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan”** pada Indikator **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**.

Selain itu dilakukan beberapa telaahan kebijakan nasional terkait dengan capaian kinerja Kementerian sebagai kebijakan nasional, meliputi:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan

### 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030

Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tujuan:</b> Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,46	87,47	87,48	87,50	87,51	87,60	87,65
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,441	0,426	0,414	0,402	0,390	0,378	0,366
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,04	66,09	68,15	70,20	71,49	72,86	74,22
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,32	77,46	78,33	78,89	79,45	79,96	80,52
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajerial	44,09%	45,11%	45,92%	46,94%	48,17%	49,63%	54,67%
<b>Sasaran 2 :</b> Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan	47,67	47,50	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00
	Ratio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45
<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,5%	67,2	68,9	70,6	72,3	74,00	74,80
<b>Sasaran 5 :</b> Terpenuhinya layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat akurat dan komprehensif	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Sasaran 6:</b> Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,9	76,00	76,25	76,50	76,75	77,00	77,25

### 3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dengan memperhatikan Visi Gubernur Kalimantan Timur **“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas “** dan Misi Pembangunan Gubernur Kalimantan Timur **meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan”** maka disusunlah program dan kegiatan pada DP3A Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan secara konkrit terlihat pada kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

### 1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk Program Eksternal lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Provinsi dan Kabupaten Kota.

### 1.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Secara umum Rancangan RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Kesesuaian tersebut dilihat dalam uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target dan pagu indikatif yang mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					22.520.769.305				5.263.776.032
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan  Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		91,2 indeks  87 %	17.777.376.393			91,4 indeks  88 %	3.463.000.000
	[ KEGIATAN ] Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,50 %	430.000.000			76,50%	728.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	4 dokumen	60.000.000	APBD		3 dokumen	120.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	7.500.000	APBD		3 dokumen	15.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	7.500.000	APBD		2 dokumen	15.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	136.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 laporan	219.000.000	APBD		1 dokumen	438.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>95%</b>	<b>14.568.985.411</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>200.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	60 orang/bulan	14.342.145.411	APBD		3 laporan	0
	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	1Dokumen	128.840.000	APBD		1 laporan	0

	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	20.000.000,00	APBD		-	40.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	16blaporan	30.000.000,00	APBD		95%	60.000.000,00
	Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	2 dokumen	50.000.000,00	APBD		45 orang/bula n	100.000.000,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>16.250.527,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>10.000.000,00</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	4 laporan	16.250.527,00	APBD		12 dokumen	10.000.000,00

	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>86 orang</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>60.000.000,00</b>
	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	3 paket	48.000.000,00	APBD		18 laporan	60.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>117 unit</b>	<b>579.803.825,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>835.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ban	Prov. Kaltim	3 paket	10.000.000,00	APBD		86 Orang	15.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	5 paket	60.026.600,00	APBD		3 paket	80.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kaltim	3 paket	25.000.000,00	APBD		85 orang	75.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamuh	Prov. Kaltim	3 laporan	40.000.000,00	APBD		12 orang	60.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	4 laporan	409.777.225	APBD		117 unit	550.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	35.000.000,00	APBD		1 paket	55.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>4 jenis jasa</b>	<b>1.676.116.017,00</b>	<b>APBD</b>		<b>6 paket</b>	<b>1.130.000.000,00</b>

	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 laporan	10.000.000,00	APBD		2 paket	15.000.000,00 D	
--	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------	-----------	---------------	------	--	---------	-----------------	--

	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	4 laporan	397.420.000,00	APBD		96 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 laporan	10.000.000,00	APBD		1 laporan	15.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 laporan	1.258.696.017,00	APBD		3 laporan	1.100.000.000,00
	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>88 unit</b>	<b>458.220.613,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>500.000.000,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Prov. Kaltim	1 unit	55.000.000,00	APBD		1 laporan	60.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	31 unit	191.220.613,00	APBD		1 laporan	220.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	80 unit	67.000.000,00	APBD		88 unit	70.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	3 unit	145.000.000,00	APBD		1 unit	150.000.000,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								

	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>35 % 51,20 - 51,26 %</b>	<b>1.072.180.012</b>	<b>APBD</b>		<b>60 unit</b>	<b>320.000.000,00</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>286.478.704,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 unit</b>	<b>-</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Prov. Kaltim	43.367.918,00	43.367.918,00	APBD			-
	[ SUB KEGIATAN ] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Prov. Kaltim	37 Lembaga	193.842.646,00	APBD		300 orang	-
	[ SUB KEGIATAN ] advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Prov. Kaltim	1 lembaga	49.268.140,00	APBD		10 lembaga	-
	[ KEGIATAN ] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	Prov. Kaltim	1 lembaga	405.709.606,00	APBD		1 laporan	-
	[ SUB KEGIATAN ] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Prov. Kaltim	5 lembaga	160.661.480,00	APBD		1 dokumen	-
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Prov. Kaltim	260 orang	93.265.510,00	APBD		35 orang	-
	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Prov. Kaltim	100 orang	151.782.616,00	APBD			-

	<b>[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>300 orang</b>	<b>379.991702,00</b>	<b>APBD</b>		<b>450 orang</b>	<b>-</b>
	[ SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	43.761.200,00	APBD		2 lembaga	200.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Prov. Kaltim	200 orang	101.478.850,00	APBD		300 orang	-
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Prov. Kaltim	1 lembaga	234.751.652,00	APBD		1 lembaga	120.000.000
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>Rasio 47</b>	<b>818.400.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>300 orang</b>	<b>-</b>
	<b>[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>818.400.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 unit</b>	<b>-</b>
	[ SUB KEGIATAN ] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	300.000.000,00	APBD		24.96%	-

[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	300 orang	518.400.000,0	APBD		10 lembaga	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>100 %</b>	<b>149.326.789,00</b>	<b>APBD</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>-</b>
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>20 data</b>	<b>149.326.798,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10 Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Prov. Kaltim	1 dokumen	79.326.789,00	APBD		85%	-
Advokasi dan Penguatan jejaring Lintas sector dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah Stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak		<b>20 lembaga</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>APBD</b>			
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>61,5 indeks</b>	<b>757.869.026,00</b>	<b>APBD</b>		<b>40 orang</b>	<b>-</b>
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>10 lembaga</b>	<b>407.772.711,00</b>	<b>APBD</b>		<b>60 layanan</b>	<b>-</b>

[ SUB KEGIATAN ] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	Prov. Kaltim	1 kebijakan	60.945.320,00	APBD		10 lembaga	-	-
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	30 orang	149.255.429,00	APBD		60 Orang	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	197.571.962,00	APBD		1 Laporan	-	
[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Prov. Kaltim	10 lembaga	350.096.315,00	APBD		30 perangkat daerah	-	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	2 kegiatan	144.037.102,00	APBD		1 Dokumen	-	

	[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	206.059.213,00	APBD		10 Lembaga	-
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>84 %</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>-</b>
	[ KEGIATAN ] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	Prov. Kaltim	1 lembaga	600.000.000,00	APBD		1 kegiatan	-
	[ SUB KEGIATAN ] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	300 orang	400.000.000,00	APBD		3.88%	-
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KIA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA tingkat provinsi , masyarakat serta Kab/Kota	Prov. Kaltim	100 Lembaga	200.000.000,00	APBD		3.88%	-
	[ KEGIATAN ] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000.000,00	APBD		1 Lembaga	-

	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	400.000.000,00	APBD		1 dokumen	-
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b> <b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>17,20 %</b> <b>2,14 %</b>	<b>872.970.297,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1.395.776.032.00</b>
	[ KEGIATAN ] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Prov. Kaltim	5 sektor	98.766.912,00	APBD		85 Layanan	275.000.000
	[ SUB KEGIATAN ] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	3 laporan	98.766.912,00	APBD		50 orang	275.000.000
	<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b> <b>Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>20 %</b> <b>69 %</b>	<b>395.776.032.00</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>740.776.032</b>
	[ KEGIATAN ] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	Prov. Kaltim	0.95%	295.776.032,00	APBD		1 dokumen	640.776.032
	[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	1 dokumen	95.776.032,00	APBD		80%	95.776.032

[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	1 daerah	100.000.000,00	APBD		20 data	175.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	1 daerah	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	370.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Persentase kampung KB mandiri	Prov. Kaltim	1 daerah	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	100.000.000
[ SUB KEGIATAN ] Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	4 Organisasi	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	100.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>79,50 %</b>	<b>378.427.353,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>380.000.000</b>
[ KEGIATAN ] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prov. Kaltim	4 organisasi	125.000.000,00	APBD			2.450.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	3 organisasi	125.000.000,00	APBD		80 %	130.000.000,00
[ KEGIATAN ] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	Prov. Kaltim	50%	253.427.353,00	APBD		1 dokumen	250.000.000,00

[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	JJumlah Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provnsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	1 Laporan	125.750.000,00	APBD	1 laporan	125.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Prov. Kaltim	1 laporan	127.677.353,00	APBD	1 laporan	125.000.000,00
<b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>		<b>Prov. Kaltim</b>		<b>1.326.421.695,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.191.503.530</b>
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Prov. Kaltim	100 %	394.419.345,00	APBD	1 laporan	494.030
[ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	95 %	52.560.000	APBD		
(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	52.560.000,00	APBD	1 laporan	-
[ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis JAAs Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	4 Jenis JAAs	257.867.345.00	APBD		
(SUB KEGIATAN)Penyediaan JAAs Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JAAs Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	257.867.345,00	APBD	1 laporan	-

	<b>[ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik	Prov. Kaltim	88 Unit	83.992.000	APBD			
	(SUB KEGIATAN) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	1 Unit	83.992.000	APBD		1 laporan	494.030.00-
	<b>[ PROGRAM ] PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>100 %</b>	<b>466.436.420,00</b>	<b>APBD</b>		<b>65,54 indeks</b>	<b>562.809.500,00</b>
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot</b>	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA	Prov. Kaltim	43 Orang	<b>466.436.420,00</b>	<b>APBD</b>		<b>4 organisasi</b>	<b>562.809.500,00</b>
	[ SUB KEGIATAN ] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	2 orang	16.025.000,00	APBD		1 dokumen	50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	8 orang	40.800.000,00	APBD		1 organisasi	50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	30 orang	164.650.000,00	APBD		40%	208.609.500,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	3 orang	17.500.000,00	APBD		1 laporan	50.600.000,00

	[ SUB KEGIATAN ] layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	10 Orang	50.617.567,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	30 Orang	108.570.000,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Prov. Kaltim	2 orang	47.122.028,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	3 orang	21.151.825,00				50.600.000,00
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang</b>	Prov. Kaltim	<b>100 %</b>	<b>465.565.930,00</b>				<b>628.200.000,00</b>
		<b>Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>							
	<b>[ KEGIATAN ] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	Prov. Kaltim	43 Orang	465.565.930,00				628.200.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	30 orang	155.050.000,00				274.000.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	2 orang	15.000.000,00				50.600.000,00

	[ SUB KEGIATAN ] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	30 Orang	108.570.000,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	8 orang	60.600.000,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Prov. Kaltim	2 Orang	11.182.000,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	3 Orang	16.320.975,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	2 Orang	47.448.132,00				50.600.000,00
	[ SUB KEGIATAN ] layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Prov. Kaltim	10 Orang	51.394.823,00				50.600.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel TC-27. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### **1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

##### **1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1.4.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

##### **1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- 2.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provins
  - 2.1.1 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
  - 2.1.2 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
  - 2.1.3 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
- 2.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provins
  - 2.2.1 pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins

2.2.2 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins

2.2.3 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau

hukum, atau sosial, an atau ekonomi Kewenangan Provinsi

2.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.3.1 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi

2.3.2 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins

2.3.3. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi

### **3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi

3.1.2 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi

### **4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

4.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

4.1.1 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

### **5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

5.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

5.1.1 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA

5.1.2 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan

ana

## **6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

6.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins

6.1.1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provins

6.1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

6.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Provinsi

6.2.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

6.2.2 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins

## **7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

7.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi

7.1.2 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provins

7.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7.2.1 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi

## **8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

8.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

8.1.1 Advokasi dan Sosialisasi GDPK

## **9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

9.1 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal

9.1.1 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana

9.1.2 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja

9.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

9.2.1 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

## **10. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

10.1 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10.1.1 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB

10.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10.2.1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

10.2.2 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi KeluargaS

## **UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS**

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **2. ROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- 2.1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.1 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.2 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.3 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.4 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.5 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.6 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.7 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.8 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- 3.1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
- 3.1.1 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.2 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.3 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.4 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.5 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.6 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&
- 3.1.7 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.8 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2026 memuat indikator kinerja outcome/output masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2027 pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD**  
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>22.520.769.305,00</b>		<b>5.263.776.032,00</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>22.520.769.305,00</b>			<b>5.263.776.032,00</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>21.647.799.008,00</b>			<b>3.868.000.000,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</i>	<b>91,2 indeks 87 %</b>	<b>17.777.376.393,00</b>	-		<b>3.463.000.000,00</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	76,50 %	430.000.000,00	-		728.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	60.000.000,00		120.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.500.000,00		15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.500.000,00		15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	136.000.000,00		140.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	219.000.000,00		438.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	95 %	14.568.985.411,00	-	200.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/ Bulan	14.342.145.411,00		0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					

	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	126.840.000,00		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00		40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	16 Laporan	30.000.000,00		60.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2 Dokumen	50.000.000,00		100.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	95 %	16.250.527,00	-	10.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	16.250.527,00		10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	86 orang	48.000.000,00	-	60.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					

	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	3 Dokumen	48.000.000,00		60.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</i>	117 unit	579.803.825,00	-	835.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	60.026.600,00		80.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	25.000.000,00		75.000.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu					
	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	3 Laporan	40.000.000,00		60.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	409.777.225,00		550.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					

	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	35.000.000,00		55.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 jenis jasa	1.676.116.017,00	-	1.130.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	397.420.000,00		0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	5 Laporan	1.258.696.017,00		1.100.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</i>	88 unit	458.220.613,00	-	500.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	55.000.000,00		60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	31 Unit	191.220.613,00		220.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	80 Unit	67.000.000,00		70.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	145.000.000,00		150.000.000,00
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b><i>Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</i></b>	<b>45,92 % 50,20 - 51,26 %</b>	<b>1.072.180.012,00</b>	<b>-</b>	<b>320.000.000,00</b>
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	<i>Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan</i>	10 Lembaga	286.478.704,00	-	0,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi</i>	1 Kebijakan	43.367.918,00		0,00
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan</i>	37 Lembaga	193.842.646,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi					

	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	1 Lembaga	49.268.140,00		0,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP</i>	1 Lembaga	405.709.606,00	-	0,00
pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan</i>	5 Lembaga	160.661.480,00		0,00
sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi</i>	260 Orang	93.265.510,00		0,00
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>	100 Orang	151.782.616,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</i>	300 Orang	379.991.702,00	-	320.000.000,00
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					

	<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi</i>	1 laporan	43.761.200,00		200.000.000,00
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek</i>	200 Orang	101.478.850,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	1 Lembaga	234.751.652,00		120.000.000,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>Rasio 47.00</b>	<b>818.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	10 lembaga	818.400.000,00	-	0,00
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	300.000.000,00		0,00
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi</i>	300 orang	518.400.000,00		0,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar</b>	<b>12 lembaga</b>	<b>72.646.788,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000.000,00</b>

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga</i>	2 lembaga	72.646.788,00	-	85.000.000,00
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</i>	1 Lembaga	72.646.788,00		85.000.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b><i>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</i></b>	<b>% 100</b>	<b>149.326.789,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>	20 data	149.326.789,00	-	0,00
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA					
	<i>Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA</i>	1 Dokumen	79.326.789,00		0,00
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak					
	<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak</i>	20 Lembaga	70.000.000,00		0,00
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b><i>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</i></b>	<b>61,5 indeks</b>	<b>757.869.026,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</i>	10 lembaga	407.772.711,00	-	0,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi</i>	1 Kebijakan	60.945.320,00		0,00
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>	30 Orang	149.255.429,00		0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>	1 Laporan	197.571.962,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	<i>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</i>	10 lembaga	350.096.315,00	-	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak					
	<i>Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak</i>	2 Kegiatan	144.037.102,00		0,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi					
	<i>jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</i>	1 Dokumen	206.059.213,00		0,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b><i>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</i></b>	<b>84 %</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</i>	1 lembaga	600.000.000,00	-	0,00
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi</i>	300 Orang	400.000.000,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota</i>	100 Lembaga	200.000.000,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</i>	1 lembaga	400.000.000,00	-	0,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	400.000.000,00		0,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>872.970.297,00</b>		<b>1.395.776.032,00</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b> <b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</b>	<b>% 17,78</b> <b>% 2,12</b>	<b>98.766.912,00</b>	-	<b>275.000.000,00</b>

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</i>	5 sektor	98.766.912,00	-	275.000.000,00
Advokasi dan Sosialisasi GDPK					
	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK</i>	3 Laporan	98.766.912,00		275.000.000,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b><i>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (meet need) Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)</i></b>	<b>79,09 % 69 %</b>	<b>395.776.032,00</b>	<b>-</b>	<b>740.776.032,00</b>
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Ratio akseptor KB</i>	0,95 %	295.776.032,00	-	640.776.032,00
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal					
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</i>	1 Dokumen	95.776.032,00		95.776.032,00
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana					
	<i>Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>	1 Daerah	100.000.000,00		175.000.000,00

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja					
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja</i>	1 Daerah	100.000.000,00		370.000.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>persentase kampung KB mandiri</i>	5,10 %	100.000.000,00	-	100.000.000,00
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana					
	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>	4 Organisasi	100.000.000,00		100.000.000,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b><i>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</i></b>	<b>% 79,50</b>	<b>378.427.353,00</b>	<b>-</b>	<b>380.000.000,00</b>
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	4 organisasi	125.000.000,00	-	130.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB					
	<i>Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB</i>	3 Organisasi	125.000.000,00		130.000.000,00

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</i>	50 %	253.427.353,00	-	250.000.000,00
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota					
	<i>Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	125.750.000,00		125.000.000,00
Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					
	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</i>	1 Laporan	127.677.353,00		125.000.000,00
<b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>			<b>1.326.421.695,00</b>		<b>1.191.503.530,00</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>1.326.421.695,00</b>		<b>1.191.503.530,00</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>1.326.421.695,00</b>		<b>1.191.503.530,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	<b>100 % 90,79 indeks</b>	<b>394.419.345,00</b>	-	<b>494.030,00</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase Realisasi Anggaran</i>	95 %	52.560.000,00	-	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	52.560.000,00		0,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 Jenis Jasa	257.867.345,00	-	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	257.867.345,00		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</i>	88 Unit	83.992.000,00	-	494.030,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1 Unit	83.992.000,00		494.030,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b><i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i></b>	<b>100 %</b>	<b>466.436.420,00</b>	<b>-</b>	<b>562.809.500,00</b>
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA</i>	43 Orang	466.436.420,00	-	562.809.500,00
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 orang	16.025.000,00		50.600.000,00
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	40.800.000,00		50.600.000,00

Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 orang	164.650.000,00		208.609.500,00
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	17.500.000,00		50.600.000,00
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	50.617.567,00		50.600.000,00
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	108.570.000,00		50.600.000,00
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	47.122.028,00		50.600.000,00
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	21.151.825,00		50.600.000,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b><i>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i></b>	<b>100 %</b>	<b>465.565.930,00</b>	<b>-</b>	<b>628.200.000,00</b>
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus</i>	43 Orang	465.565.930,00	-	628.200.000,00
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	155.050.000,00		274.000.000,00
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	15.000.000,00		50.600.000,00
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	108.570.000,00		50.600.000,00
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

	<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	60.600.000,00		50.600.000,00
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	11.182.000,00		50.600.000,00
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&					
	<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	16.320.975,00		50.600.000,00
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	47.448.132,00		50.600.000,00
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	51.394.823,00		50.600.000,00
			<b>23.847.191.000,00</b>		<b>6.455.279.562,00</b>

## PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Akhir DP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

### Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a. DP3A Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 -2026
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun 2023
- c. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seluruh bidang teknis
- d. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



## BERITA ACARA (BA) RAKORTEKBANHG TAHUN 2025

No	Kode Usulan SIPD	Kamus Usulan	Uraian Permasalahan	Volume	Satuan	Lokasi	Kelengkapan Proposal (checklist)	Kesepakatan	Catatan Pembahasan
			mebutuhkan Kapal Rescue (spek type rescue boat cabin)						didalam SIPD beserta data pendukungnya
2.	2530036	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan melalui Peningkatan Peran Aktif, Pengembangan SDM & Ekonomi Kreatif bagi Perempuan)	Terbatasnya kemampuan yang dimiliki perempuan menjadi isu yang sangat penting di masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan hidup yang datang dari ketidakseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan rendahnya tingkat keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki.	280	Orang	10 Kecamatan (Kelurahan Bandara, Gunung kelua, sungai dama, bugis, sungai kaphi, loa bakung, simpang pasir, lempake, rapak dalam, dan kelurahan mesjid		<b>Direkomendasikan dengan catatan</b>	<b>DP2H Kota Samarinda :</b> Usulan ini untuk peningkatan kapasitas wirausaha perempuan dan anak muda dalam partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif bagi perempuan  <b>DKP3A Prov. Kaltim :</b> Akan diakomodir sesuai dengan visi misi gubernur dalam meningkatkan nilai indeks pemberdayaan gender di Kota Samarinda
3.	2530253	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset	Peningkatan Prestasi olah raga( Revitalisasi Sirkuit kalan )	1	Paket	Kecamatan Loa Janan ,Kelurahan Harapan Baru		<b>Ditolak</b>	<b>Bukan Kewenangan Pemprov Kaltim</b>

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemberdayaan Perempuan	Masih kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan pada bidang politik	390	Orang	13 Kecamatan	Proposal, RAB, KAK	<b>Direkomendasikan dengan catatan</b>	<b>DKP3A Kaltim :</b> - Disarankan untuk melakukan peningkatan kapasitas perempuan melalui peningkatan di Pemberdayaan Perempuan bidang ekonomi
--	--	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Kode Usulan SIPD	Kamus Usulan	Uraian Permasalahan	Volume	Satuan	Lokasi	Kelengkapan Proposal (checklist)	Kesepakatan	Catatan Pembahasan
									perempuan (PEKKA)  <b>DP3A Berau :</b> - Sasaran adalah Perempuan yang akan ikut berkontestasi dalam Pilkada Berau yang akan datang  <b>Bappeda Kaltim:</b> - Untuk Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik utk dianggarkan pada APBD Kab. Berau

BERITA ACARA  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH  
 PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN  
 RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2025 - 2029**

---

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, telah dilaksanakan kesepakatan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 khususnya pengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pada **Sasaran 7 Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia**, dihadiri oleh perangkat daerah dan pihak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Penyampaian materi :
  - a. Penyampaian Output Utama Sektor Ketenagakerjaan dalam Mendukung Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia **“Peningkatan Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Upaya Keterkaitan Kebutuhan Industri dan Pasar Kerja”** oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim;
  - b. Penyampaian Output Utama Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mendukung Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia **“Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pengarusutamaan Gender serta Peran Perempuan Dalam Pembangunan”** oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Prov. Kaltim;
  - c. Penyampaian Output Utama Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Mendukung Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia **“Upaya Peningkatan Daya Saing Pelaku UKM di Era Digitalisasi”** oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim yang mewakili;
  - d. Penyampaian Output Utama Sektor Kepemudaan dan Olahraga dalam Mendukung Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia **“Peningkatan Daya Saing Kepemudaan Yang Berwirausaha”** oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltim.

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia sebagaimana terlampir pada Lampiran IV, maka pada:

Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU : Indikasi Program Prioritas dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Saran, masukkan dan koreksi forum lintas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 April 2025

Pimpinan sidang

**H. M. Syirajudin, SH.,MT**



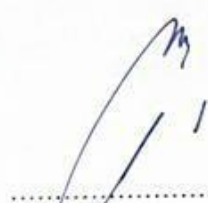



NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3. Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim															
1.	Program Pemberdayaan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	4,86	11,11	15,27	19,44	23,61	27,77						fasilitasi bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya ( pemasaran, bantuan modal usaha dan pelatihan : peningkatan SDM dan produk, pemasaran digital dan manajemen usaha	
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltim															
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1,02%	1,45%	1,50%	2%	2,50%	3%						Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang mengacu pada sektor Informal	


\*Lampiran II diisi Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu yang mendukung Pencapaian Sasaran

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	an Budidaya	Budidaya (Ton)										000	yarakat sarana perikanan Budidaya, seperti benih, benur, pakan,		
11. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim															
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim															
	<b>PROGRAM</b>														

<p>Komisi 4 DPRD Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Dinas Pendidikan Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>
<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>
<p>Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Dinas Sosial Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>
<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>

8.	Ayu	Disnakertrans Prov. Kaltim	<p>Tanggapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Disnaker sudah melakukan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk industri dan perusahaan target di tahun 2026 sebanyak 2000 orang</li> <li>- Untuk pelatihan kerja berbasis kompetensi berkerjasama dengan LPK swasta dan perusahaan</li> <li>- Proses sinkronisasi aplikasi dari Disnaker ke Aplikasi Sakti</li> </ul>
9.	Eka	Balai Pelatihan Vokasi Wilayah Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai pelatihan vokasi sudah melakukan pengembangan sertifikasi sampai pada Kab/Kota</li> <li>- Beberapa SKPD sudah melakukan beberapa pelatihan kerja dalam programnya terutama akreditasi lembaga pelatihan untuk perangkat daerah pengampu bidang tenaga kerja</li> </ul> <p style="text-align: center;">-</p>

<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>
<p>Biro Kesra Setda. Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Tim Evaluatur RPD dan RKPD Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>
<p>Tim Transisi Kepala Daerah</p>  <p>.....</p>	<p>BAN-PDM Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>
<p>BPMP Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>Balai Guru Penggerak Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>
<p>Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim</p>  <p>.....</p>	<p>IKIP-PGRI Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>

<p>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman</p> <p>.....</p>	<p>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah</p> <p>.....</p>
<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama</p> <p>.....</p>	<p>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI</p>  <p>.....</p>
<p>Fakultas Pendidikan Guru Bahasa Inggris, Sekolah Dasar, dan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Widya Gama Mahakam</p> <p>.....</p>	<p>Dewan Pendidikan Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>
<p>Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>	<p>Ikatan Ahli Perencana (IAP) Prov. Kaltim</p> <p>.....</p>